BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya sektor privat (pribadi/perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dianggap sebagai beban dalam menjalankan usaha maupun sebagai distribusi laba kepada pemerintah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekan beban seoptimal mungkin (Suady, 2011).

Demikian pula dengan membayar kewajiban dalam ketentuan pajak, masih terdapat berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum, misalnya penggunaan

metode *Groos Up* sesuai kondisi, penggunaan metode penyusutan yang cocok dengan perusahaan, penggunaan metode persediaan sesuai kondisi dan menyetor biaya pengadaan asset melalui *Capital Lease*. Arti dari optimal disini yaitu perusahaan tidak membayar sejumlah pajak yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang “paling sedikit” namun tetap dilakukan dengan cara legal yang tidak menyalahi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Upaya meminimalkan pajak secara legal sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya *tax planning* juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya yang dimiliki.

Perencanaan pajak (*Tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak (Zain 2006). Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun penyelundupan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* menunjuk pada rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*), sedangkan *tax evasion* berada diluar bingkai ketentuan perpajakan (*unlawful*).

PT. Bukit Asam (Persero) Tbk selanjutnya disebut dengan istilah PTBA adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam penambangan batubara. Selain sebagai perusahaan penambangan batubara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penambangan dan Energi No.483/201/M.DJP/1993, PTBA juga ditugaskan

sebagai pelopor penambangan briket batubara. Tepatnya pada tahun 1993 perusahaan ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan Satuan Kerja Pengusahaan Briket.

Perusahaan memiliki dua unit pertambangan yaitu Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPT) yang berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang dioperasikan dengan sistem penambangan terbuka dan unit penambangan Ombilin (UPO) yang berlokasi di Sawahlunto, Sumatera Barat dioperasikan dengan sistem tambang dalam (bawah tanah). Selain itu, Perusahaan mengoperasikan Pelabuhan Tarahan di Lampung, Dermaga Kertapati di Sumatera Selatan, Dermaga Teluk Bayur di Sumatera Barat untuk pengiriman batubara.

Sejak 23 Desember 2002, PTBA menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), dengan kode "PTBA" serta perusahaan melakukan penawaran umum saham perdana.

Kebijakan pajak yang telah diterapkan oleh PTBA saat ini adalah: pajak penghasilan (PPH pasal 21) yang dikenakan kepada karyawan ditunjang oleh perusahaan, perusahaan menggunakan metode saldo menurun untuk penyusutan aktiva tetap, perusahaan memberikan tunjangan tidak dalam bentuk natura melainkan dalam bentuk uang, perusahaan hanya menggunakan kebijakan sewa operasi disamping pembelian langsung terhadap aktiva tetap.

Saat ini yang menjadi objek penelitian oleh penulis adalah kantor pusat yang berada di Sumatra Selatan dan berlokasi di Jln. Parigi No. 1 Kabupaten Muara Enim, Tanjung Enim. Alasan penulis memilih PT Bukit Asam (Persero) Tbk. sebagai objek penelitian karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar

yang dapat menghasilkan laba yang besar pula sehingga menarik untuk diteliti bagaimana perusahaan ini melakukan perencanaan pajaknya sehingga dapat efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin menetapkan judul penelitian skripsi ini sebagai berikut: “**Implementasi *Tax Planning* Untuk Menghemat Pajak Penghasilan Terutang Perusahaan Pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.**”

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam perusahaan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh penerapan *tax planning* terhadap efisiensi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan ?

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
2. Pada penelitian ini data utama diperoleh berdasarkan data sekunder yaitu laporan keuangan, serta data pendukung berupa dokumentasi serta wawancara terstruktur.
3. Data yang diambil adalah data tahun 2011.
4. Peraturan yang digunakan adalah peraturan Perpajakan Indonesia.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui pengaruh penerapan *tax planning* terhadap efisiensi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, memperluas wawasan penulis mengenai penerapan perencanaan pajak
2. Bagi perusahaan/wajib pajak, sebagai masukan atau sumbangan pikiran mengenai perencanaan pajak yang sesuai dengan legalitas undang-undang perpajakan.

3. Bagi fiskus, pembahasan *tax planning* ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, dalam melakukan pemeriksaan *tax planning* yang dibuat oleh wajib pajak, karena telah disusun sesuai dengan undang-undang perpajakan.
4. Bagi pihak lain atau pembaca, dapat memberikan gambaran dan masukan dalam melakukan penelitian dalam bidang permasalahan yang sama.